



Pemkot Terima Setoran Rp1,25 Juta

■ Pengelola Parkir Sekaten Akui Harus Bayar Lahan

YOGYA, TRIBUN - Keluhan masyarakat terkait dengan tarif parkir di arena Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) yang sudah terjadi bertahun-tahun terus berulang. Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara PMPS sekaligus yang memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah ini seperti tak bisa berbuat banyak.

Untuk PMPS tahun ini, bahkan warga mengeluh dipungut Rp5.000 sekali parkir sepeda motor di arena PMPS. Hari Widariyanto, seorang pengunjung PMPS mengaku harus membayar Rp5.000 untuk parkir sepeda motor miliknya.

Senada Agung Mandala, bahkan sempat memotret karcis parkir sepeda motor di arena PMPS yang jelas-jelas bertuliskan tarif Rp5.000. Namun karcis tersebut tampak-

nya diterbitkan oleh komunitas masyarakat yang ikut mengelola parkir di PMPS.

"Tahun lalu parkirnya Rp3.000 tapi tahun ini naik menjadi Rp5.000," kata Agung.

Kesaksian berbeda diberikan oleh Andi Sulistyono yang berkunjung ke PMPS pada Senin (13/11) sore. Saat ditemui Tribun Jogja di arena PMPS, Andi yang mengaku sebagai karyawan swasta ini mengaku membayar parkir untuk sepeda motor sebesar Rp3.000.

Walau mendapat karcis parkir, dirinya tak tahu bahwa itu bukan tarif normal. "Saya gak tahu harga normalnya, cuman disodorin karcis Rp 3.000 saya pikir itu tarif resmi ya saya bayar saja," ujar Andi.

● ke halaman 11

Pemkot Terima Setoran Rp1,25

• Sambungan Hal 1

Permasalahan parkir ini tampaknya tak seimbang dengan pemasukan yang diperoleh Pemkot Yogyakarta dari parkir di arena PMPS ini tidak signifikan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menyebut, pendapatan pajak parkir dari 20 hari penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) ditetapkan sebesar Rp 1,25 juta.

Bisnis menggiatkan

Sebagai agenda tahunan, ajang PMPS memang menjanjikan pundi-pundi bagi sejumlah kalangan. Salah satunya, melalui bisnis lahan parkir. Tidak bisa dipungkiri, keuntungan dari pengelolaan parkir selama PMPS memang cukup menggiatkan. Bagaimana tidak, ajang PMPS ini hampir selalu dipadati pengunjung setiap harinya.

Ardiansyah, salah satu pengelola lahan parkir di PMPS mengatakan, pihaknya bisa meraup sekitar Rp500 ribu per hari. Bahkan, angka tersebut bisa meningkat hingga dua kali lipat, saat memasuki akhir pekan, atau hari libur.

"Kalau akhir pekan, pemasukan bisa hampir Rp1 juta. Tapi, kalau cuaca pas hujan, Rp100 ribu saja sudah bagus," katanya, Senin (13/11).

Ardiansyah menuturkan, pendapatan tersebut kemudian dibagi rata, untuk para juru parkir. Lanjutnya, dalam setiap kapling, terdapat jumlah pekerja yang bermacam-macam, tergantung luas

lahan yang dikelola.

"Ada yang cuma lima orang, tapi ada juga yang sampai 15 orang, tergantung luas lahannya. Biasanya pendapatan langsung dibagi, tapi ada juga yang ditabung, pembagiannya nanti, pas hari terakhir Sekaten," tuturnya.

Semuanya legal

Ardiansyah tidak memungkir, kalau rata-rata kapling di Sekaten menarik biaya parkir sebesar Rp3.000, atau lebih besar dari aturan, yakni Rp1.000. Walau begitu, pihaknya memiliki alasan menaikkan tarif. "Uang parkir bukan cuma masuk kantong pribadi, tapi juga buat bayar lahan juga. Kalau tarifnya Rp1.000, apa bisa menutup setoran dan bayar pegawai? Sedangkan lahannya saja kurang memadai," jelasnya. "Belum lagi risiko jaga sepeda motor orang, terlalu kecil kalau tarifnya Rp1.000," imbuh warga Gondomanan tersebut.

Sementara itu, pengelola lahan parkir Sekaten lainnya, Sugenk, menambahkan, seluruh kapling jasa penitipan kendaraan bermotor yang berada di bawah naungan Forum Komunikasi Kawasan Alun-alun Utara (FKKU), berstatus legal, alias berizin resmi. "Perizinan melalui kecamatan (Gondomanan), bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Kota Yogyakarta). Pembayaran pajaknya lewat kecamatan, nanti mereka yang menyalurkan," ungkapnya.

Sugenk menambahkan, uang retribusi tersebut dibayarkan beberapa hari sebelum gelaran pasar malam berakhir. Terkait besaran pajak, lanjutnya, menyesuaikan letak dan ukuran lahan,

sehingga kewajiban setiap kapling tentu berbeda-beda.

Tapi, untuk tahun ini, kita belum dipanggil lagi sama kecamatan, untuk menentukan besaran pajak," katanya.

Wewenang kecamatan

Pengelolaan parkir di ajang PMPS ini ternyata diserahkan sepenuhnya ke Kecamatan Gondomanan. Wakil Ketua Panitia PMPS 2017, Sri Harnani mengatakan, pengelolaan parkir dilimpahkan ke Kecamatan. Termasuk kesepakatan pada tarif parkir juga ditentukan oleh wilayah. "Untuk parkir kesepakatan dengan Kecamatan Gondomanan," ujar Sri.

Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanudin Aziz menjelaskan, parkir saat Sekaten menjadi ranah Kecamatan. Penentuan tarif bisa disepakati dengan mengacu pada Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir.

"Kalau penegakan tetap oleh Satpol PP karena ini kan berdasarkan Perda," jelasnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyebut tidak tahu tarif parkir yang disepakati saat perayaan Sekaten berlangsung. Ia menyerahkan sepenuhnya pada kesepakatan antara kecamatan dengan panitia PMPS. "Saya tidak tahu kesepakatannya bagaimana, tapi saya tahu sudah ada aturannya tentang kesepakatan itu," kata Heroe.

Pada tahun ini, penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten akan digelar selama 21 hari yaitu dua pekan sebelum Sekaten dan satu pekan selama Sekaten, atau pada 10 November hingga 30 November. (gil/aka/nto/ufi)

Kecamatan Terapkan Tarif Progresif

CAMAT Gondomanan, Agus Arif selaku pengampu wilayah Alun-alun Utara menyebut hanya mengeluarkan satu jenis karcis parkir. Tarif yang tertera di karcis pun sesuai dengan Perda yang berlaku.

"Karcis resmi kami yang dikeluarkan dan hanya untuk sepeda motor saja sesuai tarif dalam Perda yang berlaku," ungkap Agus.

● ke halaman 11

Kecamatan Terapkan Tarif

● Sambungan Hal 1

Agus menjelaskan, sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir kawasan satu atau zona wisata, maka tarif yang diberlakukan di arena PMPS adalah Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 mobil.

la menambahkan, tarif tempat khusus parkir berlaku tarif progresif. Tarif tersebut merupakan tarif awal yang berlaku pada dua jam pertama, selanjutnya dikenai tarif tambahan sebesar 50 persen dari tarif awal.

"Kalau kita lihat, rata-rata pengunjung Sekaten bisa sampai lebih dari dua jam lebih sedangkan pengelola parkir kita

tidak memiliki alat ukur khusus untuk menghitung tarif progresif, sehingga kita seragamkan menjadi Rp 2.000," jelas Agus.

Bagi hasil

Terkait dengan mekanisme pengelolaan parkir, Agus menyebut sebanyak 60 persen keuntungan akan diberikan ke pengelola parkir usai penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS).

"Teknis pembagiannya di akhir, jadi nanti sistemnya kita *refund*. Kami sudah berkomunikasi dengan komunitas warga yang mengelola parkir. Harapannya, mereka bisa memberikan pelayanan dengan baik dan menyesuaikan aturan yang berlaku," ungkapnya.

Pada penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten, komunitas warga di Alun-Alun Utara diberi kewenangan untuk mengelola parkir pengunjung, khususnya parkir kenda-

raan roda dua yang berada di sekeliling Alun-alun Utara yang menjadi lokasi penyelenggaraan Sekaten.

Pada tahun lalu, terdapat 11 blok parkir kendaraan roda dua di sekeliling Alun-Alun Utara Yogyakarta. Setiap blok dikelola oleh lima hingga 10 warga dengan tarif parkir "flat" atau tetap tanpa ada penghitungan durasi parkir, yaitu Rp3.000 untuk sepeda motor.

Selain blok resmi untuk parkir sepeda motor, terdapat beberapa titik parkir yang dikelola secara pribadi oleh warga di sekitar Alun-Alun Utara Yogyakarta. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono menyebut, pendapatan pajak parkir dari 20 hari penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) hanya sebesar Rp 1,25 juta. (gfi/nto/aka/ufi)

Butuh Ketegasan Pemerintah

DR. Hempri Suyatna
Dosen Fisipol UGM



MASALAH tarif parkir yang tinggi menurut saya disebabkan mentalitas masyarakat yang cenderung instan. Sehingga yang muncul adalah konsep *aji mumpung*. Mumpung ada dan mumpung bisa mengeruk keuntungan, akhirnya timbulah permasalahan parkir dengan tarif tinggi.

● ke halaman 11

Butuh Ketegasan Pemerintah

● Sambungan Hal 1

Di sisi lain perlu adanya regulasi atau pengawasan dari pemerintah, jangan sampai ada yang melakukan *aji mumpung* tersebut. Pengalaman kemarin ada pedagang di Malioboro yang memukul harga tinggi, akhirnya diberi sanksi menutup warung untuk beberapa hari.

Langkah tersebut juga dapat digunakan untuk menertibkan parkir yang ada di kawasan sekaten. Namun saya kira proses itu juga tidak mudah,

karena melibatkan kelompok masyarakat dan premanisme parkir. Ini merupakan kendala tapi tetap harus ditertibkan.

Parkir resmi itu harusnya ada, karena mengacu pada perda atau perwali yang juga mengatur tentang perparkiran. Apabila memang melibatkan kelompok informal, mereka harus memiliki karcis dari dinas terkait yang menerbitkan karcis parkir. Karcis jangan dibuat secara ilegal. Kalaupun boleh menggunakan karcis sendiri, maka perlu diatur atau disepati tentang kuota batas maksimal.

Pemerintah jangan terlalu membiarkan adanya premanis-

me perparkiran karena bila tidak ditertibkan akan menyangkut masa depan Yogyakarta. Kelemahan kita adalah tidak berpikir jangankan panjang, yang harusnya ini bisa jadi bagian investasi ke depan terkait citra sekaten dan wisata di Yogyakarta.

Perlu dipahami Sekaten adalah perayaan masyarakat banyak dan orang-orang kecil. Maka semua orang harus punya akses yang mudah untuk masuk ke situ. Jangan sampai orang kecil malah dipersulit dengan biaya parkir yang tinggi dan akhirnya akan menyebabkan mereka enggan datang ke situ. (nto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Kecamatan/Kemantren Gondomanan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005